



Pemerintah Provinsi Gorontalo
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan



revisi
renstra
rencana strategis
2017-2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Visi, Misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

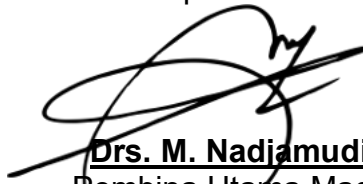
Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara fungsional, Renstra ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, serta menjangkau kemitraan lintas sektor, lintas program dan lintas pelaku. Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan program dan kegiatan terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya. Selain itu kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022.

Gorontalo, Januari 2019

Kepala Dinas



Drs. M. Nadjamudin
Pembina Utama Madya
NIP. 196305101993031013

DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
B. Sumber Daya SKPD	12
C. Kinerja Pelayanan SKPD	15
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	32
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	32
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	39
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
A. Strategi dan Kebijakan SKPD	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 November 2017	12
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 November 2017	13
Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan Per 31 November 2017	14
Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 November 2017	15
Tabel 2.5. Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota	16
Tabel 2.6. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota	17
Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi	17
Tabel 2.8. Koperasi Berskala Besar	18
Tabel 2.9. Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2012 – 2016	18
Tabel 2.10. Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota	19
Tabel 2.11. Perkembangan IKM	20
Tabel 2.12. Jumlah IKM Per Kabupaten/Kota Tahun 2016	20
Tabel 2.13. Pasar Tradisional dan Pasar Modern	21
Tabel 2.14. Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo	22
Tabel 2.15. Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo	23
Tabel 2.16. Jumlah Bank Pemerintah dan Swasta di Provinsi Gorontalo	23
Tabel 2.17. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	25
Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	26
Tabel 2.19. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo	26
Tabel 3.20. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38
Tabel 3.21. Sasaran Pertumbuhan Industri	43

Tabel 4.22.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	52
Tabel 5.23.	Strategi dan Kebijakan Bidang KUMKM	54
Tabel 5.24.	Strategi dan Kebijakan Bidang Perindustrian	54
Tabel 5.25.	Strategi dan Kebijakan Bidang Perdagangan	55
Tabel 5.26.	Strategi dan Kebijakan Bidang Pelayanan SKPD	55
Tabel 5.27	<i>Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu Pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022</i>	56
Tabel 6.28	Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022	59
Tabel 7.29	Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017	66

DAFTAR GAMBAR

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sesuai Pergub 67 Tahun 2016	11
Gambar 2 Sasaran Kementerian Perdagangan 2015 – 2019	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mencakup hampir seluruh lapangan usaha (sektor riil) dan tersebar di seluruh kecamatan dan desa, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan perekonomiannya.

Oleh karena keberadaan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat, maka pemberdayaan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan merupakan kebijakan strategis dalam kerangka pembangunan daerah, mengingat perannya sebagai penyeimbang pemerataan dan distribusi pendapatan, penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Dengan meningkatkan peran dan kemampuan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan, maka kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pasti akan meningkat.

Peranan sektor KUMKM termasuk industri kecil menengah dan perdagangan didalamnya semakin penting dalam perekonomian daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya sektor KUMKM terlihat dari peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Gorontalo.

Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa yang mendukung perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pariwisata dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor impor, pembangunan

sekaligus revitalisasi pasar tradisional, penyediaan kebutuhan pokok, stabilisasi harga, sinergi pengembangan koperasi, UMKM dan petani/nelayan di bidang perdagangan dan industri olahan.

Dengan memperhatikan kontribusi dan tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, maka kebijakan pembangunan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan penting untuk diselaraskan baik secara vertikal antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, juga secara horizontal dengan para pemangku kepentingan yang terlibat aktif didalamnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta melihat peluang perkembangan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan di daerah yang sangat potensial kedepan, maka Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, yang kemudian berubah nomenklatur SKPD menjadi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo berdasarkan Pergub Nomor 57 Tahun 2016, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi mengarahkan pelayanan publik SKPD dan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD.

Sejalan dengan kerangka berpikir diatas, dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 diharapkan dapat memandu SKPD dan pemangku kepentingan terkait dalam menjawab tiga hal mendasar :

- 1) Arah pelayanan yang akan dilaksanakan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
- 2) Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai;

- 3) Harmonisasi program dan kegiatan strategis yang perlu dilakukan dalam rangka memaksimalkan hasil, baik lintas pusat, provinsi, kabupaten/kota serta lintas sektor dan lintas pelaku.

Dengan begitu maka Renstra bukan saja sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan SKPD, tetapi juga sekaligus sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta lintas sektor dan lintas pelaku.

Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 telah melalui serangkaian proses perumusan, penyusunan, finalisasi hingga penetapan, yang meliputi :

- 1) Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022
- 2) Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan SKPD, tenaga ahli, SKPD Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan terkait;
- 3) Forum SKPD Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017, yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD;
- 4) Penyampaian rancangan Renstra SKPD ke Bappeda Provinsi Gorontalo untuk diverifikasi dan menjadi masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.
- 5) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD melalui Musrenbang RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 – 2022 dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Finalisasi Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 pada tanggal 30 Mei 2017 di Restoran Meranti Indah, Kabupaten Bone Bolango. Pada tahap ini dilakukan penajaman visi, misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta menunjang pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

- 6) Pengesahan Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, dan
- 7) Penetapan Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

Dalam kedudukannya sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun), Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, serta mengacu pada Renstra K/L meliputi Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Tahun 2015 – 2019, Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015 – 2019 dan Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2015 – 2019.

Disamping itu, dalam penyusunannya Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 memperhatikan Renstra SKPD Kabupaten/Kota yang telah lebih dahulu ada, kecuali untuk Renstra SKPD Dinas Perindagkop Kabupaten Boalemo, yang penyusunannya dilakukan hampir bersamaan waktu dengan Renstra SKPD DisKumperindag.

Dalam pelaksanaannya, Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 akan menjadi pedoman bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan SKPD Kabupaten/Kota terkait dalam merumuskan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo;
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Gorontalo;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan selang lima tahun kedepan dalam upaya mewujudkan visi misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 dan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025.

b. Tujuan

- 1) Menjadi acuan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam menyusun, menyelaraskan pelaksanaan serta pengendalian program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 2012 – 2017.
- 2) Menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan setiap tahunnya untuk kurun waktu 2012 – 2017.
- 3) Menjadi media informasi, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah diluar Gorontalo dan stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Provinsi Gorontalo.

2. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- I. Pendahuluan memuat tentang latar belakang secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Rencana Kerja SKPD, landasan hukum penyusunan Renstra, serta maksud dan tujuan disusunnya Renstra SKPD ini.
- II. Gambaran pelayanan SKPD memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

- III. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.
- IV. Tujuan dan sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sesuai dengan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 – 2022.
- V. Strategi dan arah kebijakan memuat tentang strategi dan arah kebijakan setiap bidang urusan (Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan)
- VI. Rencana program dan kegiatan, serta pendanaan memuat tentang program dan kegiatan serta pendanaannya.
- VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat tentang indikator SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.
- VIII. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Provinsi Gorontalo merupakan daerah pemekaran Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Pebruari 2001. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas, Badan, Biro, Kantor, Sekretariat, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), termasuk Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Dalam perjalanannya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur nama dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa perubahan nomenklatur tersebut berdasarkan Peraturan Daerah yang mendasarinya sebagai berikut :

1. Perda Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bernama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Tenaga Kerja disingkat Dinas Perindagkopraker.
2. Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berubah menjadi 2 (dua) dinas yang terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
 - b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
3. Perda Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan :
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
 - b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
4. Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
5. Perda No. 12 Tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan hingga sekarang.

6. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

1. Tugas Pokok SKPD

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tugas tersebut di atas merupakan kelembagaan, yang menjadi tanggung jawab seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, guna menyelesaikan dan menindaklanjuti pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan yang dimiliki, yang dilandasi dengan 5 (lima) Nilai Budaya Kerja, yakni :

- a. Inovasi (*Innovation*)
- b. Kerjasama Tim (*Team Work*)
- c. Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Trust Worthiness*)
- d. Membangun Kesejahteraan Masyarakat (*Prosperity*) dan
- e. Cepat (*Speed*).

2. Fungsi SKPD

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;

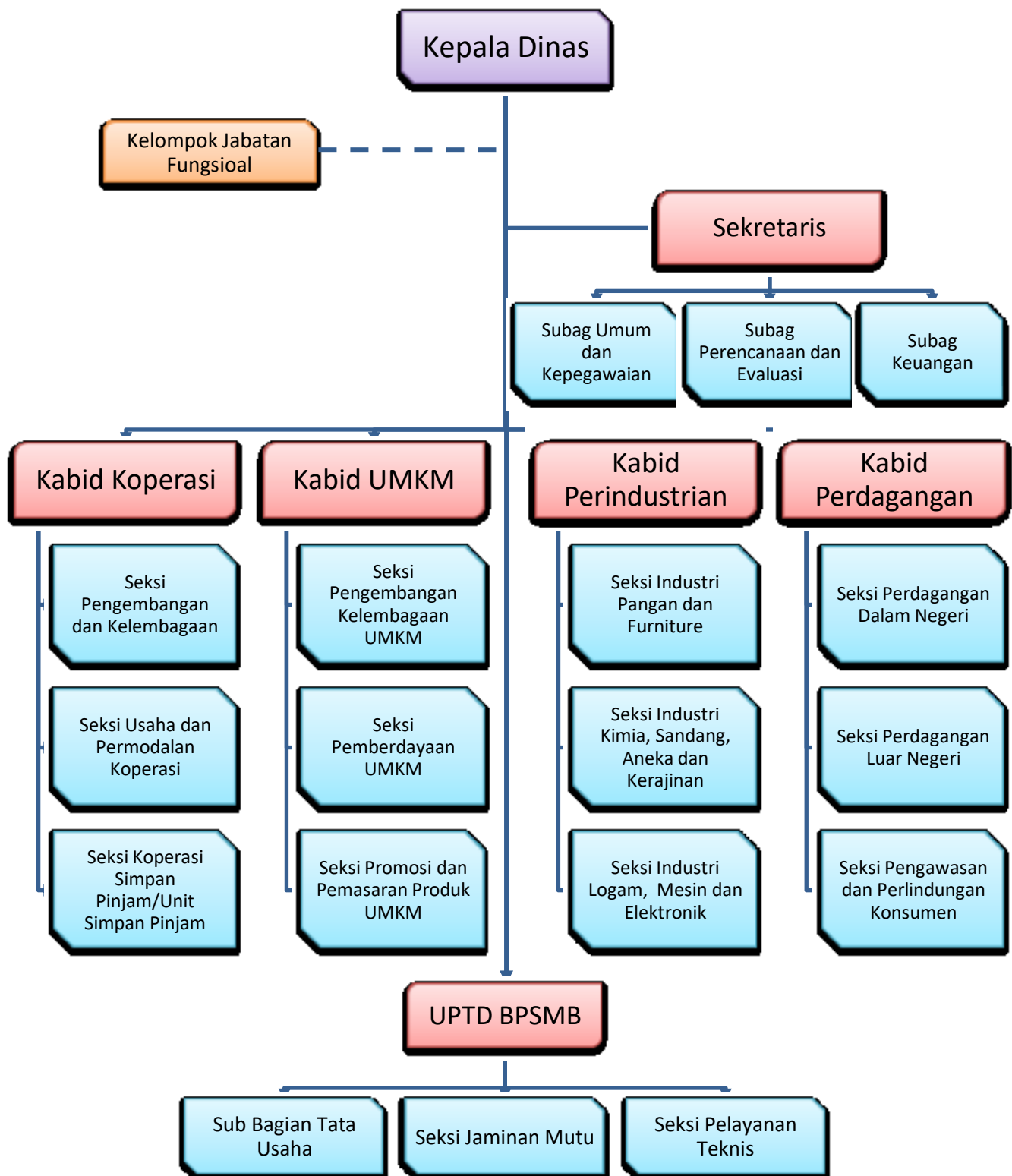
- c. Pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi dan Perdagangan;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; serta
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi SKPD

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang UMKM;
- e. Bidang Perindustrian;
- f. Bidang Dinas Perdagangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih lengkapnya, struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sesuai Pergub 67 Tahun 2016

B. Sumber Daya SKPD

Kondisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Per 31 November 2017 berjumlah 93 orang, dan juga terdapat pegawai honor honor APBD/APBN sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 November 2017

No.	Unit Organisasi	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	11	10	21
2	Subdin Koperasi	7	7	14
3	Subdin UMKM	6	7	13
4	Subdin Perindustrian	3	9	12
5	Subdin Perdagangan	8	9	17
6	UPTD BPSMB	5	11	16
JUMLAH		40	53	93

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Data diatas menunjukkan proporsi antara pegawai laki-laki dan perempuan di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo hampir berimbang. Jumlah pegawai perempuan menempati 57% sedangkan pegawai laki-laki 43%. Konsentrasi pegawai terbanyak di bagian Sekretariat sebanyak 21 orang, kemudian diikuti oleh bidang Perdagangan berjumlah 17 orang, UPTD BPSMB 16 orang, Bidang Koperasi 14 orang, Bidang UMKM 13 orang, dan Bidang Perindustrian sejumlah 12 orang.

Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran dan jumlah pegawai di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's, di mana ada keseimbangan antara jumlah pegawai perempuan dan laki-laki.

2. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 November 2017

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D 1,2,3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	5	3	9	4	21
2	Subdin Koperasi	-	-	3	1	5	5	14
3	Subdin UMKM	-	-	4	1	6	2	13
4	Subdin Perindustrian	-	-	-	-	8	4	12
5	Subdin Perdagangan	-	-	1	4	10	2	17
6	UPTD BPSMB	-	-	2	3	6	5	16
TOTAL		-	-	15	12	44	22	93

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Data di atas menunjukkan bahwa di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tidak ada lagi pegawai yang berpendidikan SD dan SMP. Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 47.31% berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1), pendidikan SMA sebesar 16.13%, pendidikan D1, D2 dan D3 12.90% dan pendidikan S2 sebesar 23.66%.

Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan SDM yang handal dan profesional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian.

Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistematis terhadap kesesuaian disiplin ilmu dengan tupoksi SKPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

3. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Adapun keadaan pegawai Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan Per 31 November 2017

No	Unit Organisasi	I	II	III	IV	Jumlah
1	Sekretariat	-	7	11	3	21
2	Subdin Koperasi	-	4	9	1	14
3	Subdin UMKM	-	2	10	1	13
4	Subdin Perindustrian	-	-	10	2	12
5	Subdin Perdagangan	-	4	13	-	17
6	UPTD BPSMB	-	5	8	3	16
TOTAL		-	22	61	10	93

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari 65.59% golongan III, 23.66% golongan II, dan 10.75% golongan IV. Sedangkan untuk golongan I tidak ada lagi. Dari 61 orang pegawai golongan III, hanya 3 orang yang berpendidikan SMA dan 1 orang berpendidikan Diploma sedangkan sisanya merupakan pegawai Golongan III yang berpendidikan S1 dan S2.

Untuk itu, pengembangan SDM di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi jumlah pegawai bergolongan II yang jumlahnya mencapai 22 orang atau 23,66% dari total jumlah pegawai 93 orang.

4. Keadaan Pegawai Menurut Eselon

Untuk pegawai Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 November 2017

No	Unit Organisasi	Eselon			Pejabat Fungsional	Widya Iswara	Staf	Jumlah
		II	III	IV				
1	Sekretariat	1	1	3	-	-	16	21
2	Subdin Koperasi	-	1	3	-	-	10	14
3	Subdin UMKM	-	1	3	-	-	9	13
4	Subdin Perindustrian	-	1	3	-	-	8	12
5	Subdin Perdagangan	-	1	3	-	-	13	17
6	UPTD BPSMB	-	1	3	6	-	6	16
TOTAL		1	6	18	6	-	62	93

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 6.45% dan pejabat eselon IV berjumlah 18 orang atau 19.35% dan sisanya adalah staf sebanyak 62 orang atau 66.67% dan 6 orang tenaga fungsional Penguji Mutu Barang.

Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag masih sangat terbatas jumlahnya, sementara keberadaan jabatan fungsional sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang dimaksud adalah pencapaian indikator kinerja sasaran SKPD sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022. Berikut uraian capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo selang tahun 2012 – 2017.

Dalam rangka pembangunan daerah bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang bertanggung jawab, efektif dan efisien, maka diperlukan sinergi dan interaksi yang konstruktif antara pemerintah daerah, sektor swasta,

dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melalui Rencana Strategis Tahun 2012-2017 menetapkan Visi **“Percepatan Pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing”**.

Dengan visi-misi tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2012 – 2017 beserta anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017

Kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Tahun 2012 – 2017 akan diuraikan dalam 2 (dua) bagian, yakni *Pertama*, capaian kinerja berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, dan *Kedua*, capaian kinerja pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

• Bidang Koperasi

Koperasi sebagai soko guru ekonomi terus ditingkatkan perannya dalam mendorong mobilitas ekonomi di Provinsi Gorontalo. Periode 2012 hingga 2017 jumlah koperasi di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Pada tahun 2012 jumlah koperasi tercatat sebanyak 1.030 unit dan meningkat menjadi 1.209 unit Tahun 2016, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Gorontalo	246	257	269	281	285
2	Kab. Gorontalo	343	365	380	385	394
3	Kab. Boalemo	108	121	125	125	130
4	Kab. Pohuwato	107	115	117	121	121
5	Kab. Bone Bolango	112	118	123	126	131
6	Kab. Gorontalo Utara	90	97	101	106	108
7	Provinsi Gorontalo	24	28	33	35	40
JUMLAH		1030	1101	1148	1,179	1,209

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo , 2017

Dari total 1.209 koperasi tersebut, sebanyak 45,6 persennya atau 551 unit merupakan koperasi tidak aktif. Meskipun jumlah koperasi tidak aktif berada dibawah dari rata-rata nasional, namun kenyataan ini menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan dan pembenahan koperasi di daerah.

Tabel 2.6. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	2012		2016		% kenaikan	
		Aktif	Tidak aktif	Aktif	Tidak aktif	Aktif	Tidak aktif
1	Kota gorontalo	131	115	158	127	17.09%	-3.15%
2	Kab. Gorontalo	276	76	188	206	-46.81%	33.98%
3	Kab. Boalemo	76	32	69	61	-10.14%	-24.59%
4	Kab. Pohuwato	49	58	84	37	41.67%	-32.43%
5	Kab. Bone bolango	58	54	75	56	22.67%	-3.57%
6	Kab. Gorontalo utara	56	34	57	51	1.75%	9.80%
7	Provinsi gorontalo	11	13	27	13	59.26%	15.38%
Jumlah		648	382	658	551	1.52%	-17.60%

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2017

Peran koperasi terhadap pembangunan dan perekonomian daerah juga terlihat dari sisi jumlah anggota, perkembangan modal, aset, koperasi sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jlh Anggota (orang)	126.574	131.950	135.831	136.992	137.033
Modal Sendiri (Rp. 000)	125.113.131	140.882.246	145.702.326	176.259.543	180.518.139
Modal Luar (Rp. 000)	215.321.158	237.492.625	230.276.588	212.437.496	212.639.659
Asset (Rp.000)	330.427.462	360.499.349	377.822.371	422.322.159	444.434.383
Volume Usaha (Rp. 000)	294.539.322	336.555.441	353.777.798	410.781.059	408.399.541
SHU (Rp. 000)	17.419.582	22.111.391	27.133.743	23.313.209	24.540.393

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2016

Data diatas menunjukkan perkembangan jumlah anggota, permodalan, aset, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi selang tahun 2012–2017 mengalami fluktuasi, namun secara umum semua indikator tersebut mengalami peningkatan. Selang tahun 2012–2016 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan dari 126.574 orang menjadi 137.033 orang, atau turun sebesar 7,63%. Demikian halnya dengan modal sendiri meningkat dari Rp. 125.11 milyar menjadi Rp. 180.51 milyar atau naik sebesar 30,69%,

modal luar dari Rp. 215.32 milyar menjadi Rp. 212,63 milyar atau turun 1,26%, asset dari Rp. 330.42 milyar menjadi Rp. 444.43 milyar atau naik 25,65%, volume usaha dari Rp. 294.53 milyar menjadi Rp. 408,39 milyar atau naik 27,87%, dan total SHU mengalami kenaikan dari Rp. 17.41 milyar menjadi Rp. 24,54 milyar atau naik sebesar 28,97%.

Disamping itu, selang tahun 2012 – 2017, Provinsi Gorontalo telah memiliki 3 koperasi berskala besar tingkat nasional sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8. Koperasi Berskala Besar Tahun 2017

No	Nama Koperasi	Jumlah Anggota (orang)	Total Aset Rp.(000)	Omset Rp .(000)	SHU Rp. (000)
1	KSU Mekar Jaya Kota Gorontalo Kec. Kota Tengah	889	10,078,630	16,676,505	410,985
2	KSP. KPKD Kab. Gorontalo Kec. Limboto	1,378	9,589,846	16,505,814	350,032
3	KPRI Eka Prasetya Kab. Gorontalo Kec. Limboto	1,259	3,589,632	4,308,297	55,244
4	Kop. Tebu Rakyat Mitra Bangkit Kab. Boalemo Kec. Paguyaman	212	10,289,425	2,774,113	30,297
JUMLAH		3,739	33,547,533	40,264,729	846,558

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2017

- **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Sedangkan untuk perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah UMKM sebanyak 42.523 unit dan Tahun 2016 menjadi 81.776 unit, atau meningkat sebesar 52% selama 5 tahun, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9 Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2012 – 2016

UMKM	2012	2013	2014	2015	2016
Usaha Mikro	36.255	46.363	64.520	68.092	73.309
Usaha Kecil	5.581	7.087	5.772	7.270	6.874
Usaha Menengah	687	1.243	461	626	1.593
Total	42.523	54.693	70.703	75.988	81.776

Sumber : Data Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2017

Perkembangan jumlah UMKM tersebut merupakan akumulasi dari pertumbuhan UMKM di kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10 Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Gorontalo	17.626	27.666	30.434	32.391	33.468
Kab. Boalemo	6.294	6.069	6.069	4.272	4.983
Kab. Pohuwato	4.672	5.100	2.521	4.971	6.513
Kab. Bone Bolango	1.412	1.656	17.768	20.031	22.738
Kab.Gorontalo Utara	2.006	2.508	3.386	3.386	5.649
Kota Gorontalo	10.513	11.694	10.525	10.937	8.425
Jumlah	42.523	54.693	70.703	75.988	81.776

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2017

Tabel diatas menunjukkan tingkat pertumbuhan UMKM terbesar di Kabupaten Bone Bolango, dengan tingkat pertumbuhan dari tahun 2012 – 2017 mencapai 533%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Gorontalo sebesar 183%, Gorontalo Utara 281%%, Kabupaten Pohuwato 139%%, sedangkan Kota Gorontalo mengalami penurunan jumlah UMKM sebanyak 19,81 %. Dan kabupaten Boalemo mengalami penurunan jumlah UMKM sebanyak 79%. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan UMKM di Provinsi Gorontalo mencapai 192%, atau berkembang hampir 2 kali lipat jumlahnya. Namun demikian harus diakui bahwa perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha, dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika kebijakan pemerintah menaikkan BBM jadi diterapkan.

- **Industri Kecil Menengah (IKM)**

Industri Kecil Menengah disingkat IKM merupakan bagian dari UMKM yang bergerak dibidang industri pengolahan baik kerajinan, sandang, pangan, logam dan kimia. Selang tahun 2012 – 2016, IKM di Gorontalo berkembang

cukup pesat, baik dari sisi jumlah, penyerapan tenaga kerja, nilai investasi maupun nilai produksi, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Perkembangan IKM

No	Uraian	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah IKM (unit)	12.360	12.921	13.688	14.084	14.339
	- Industri Mikro	11.909	12.470	13.237	12.795	12.924
	- Industri Kecil	436	436	436	1.221	1.331
	- Industri Menengah	15	15	15	68	82
2	Jumlah Sentra IKM (Unit)	272	415	289	289	224
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	31.910	34.564	36.978	35.276	35.620
3.	Nilai Investasi (Rp. 000)	132.942.851	134.144.956	150.230.351	174.058.072	187.527.594
4.	Nilai Produksi (Rp. 000)	510.021.820	476.005.172	530.844.551	539.536.681	538.443.310

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan perkembangan IKM selang tahun 2012 - 2016 naik sebesar 16,01% , dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2016. Demikian halnya dengan jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Jumlah tenaga kerja meningkat dari 31.910 orang di tahun 2012 menjadi 35.620 orang di tahun 2016, atau naik sebesar 11,63%. Nilai investasi meningkat dari Rp. 132,942 milyar tahun 2012 menjadi Rp. 187.527 milyar tahun 2016, atau naik sebesar 29,1%. Sedangkan nilai produksi meningkat dari Rp. 510.021 milyar di tahun 2012 menjadi Rp. 538.443 milyar pada tahun 2017, atau naik sebesar 5,2%.

Berikut data penyebaran IKM per kabupaten/kota selang 2012 – 2017 sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 Jumlah IKM Per Kabupaten Kota tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Tenaga Kerja		
			P	W	Total
1	Kota Gorontalo	2.849			6.404
2	Kab. Gorontalo	3.135	4.725	4.431	9.156
3	Boalemo	701	1.466	683	2.149

4	Pohuwato	2.713	3.095	2.824	5.919
5	Bone Bolango	2.587	5.353	1.028	6.381
6	Gorontalo Utara	2.099	2.590	2.677	5.267
Provinsi 2016					35.620
Provinsi 2015		14.084	17.229	11.643	35.276
Provinsi 2014		13.688			36.978
Provinsi 2013		12.921			34.564
Provinsi 2012		12.360			31.910
Provinsi 2011		11.718			30.596
Provinsi 2010		9.252			28.281
Provinsi 2009		8.569			27.003
Provinsi 2008		8.622			27.243

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017

- **Perdagangan**

Salah satu sarana penting dalam mendukung pengembangan usaha UMKM dan IKM adalah ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa. Hingga tahun 2016 Pasar Tradisional di Provinsi Gorontalo berjumlah 121 unit dan Pasar Modern 5 unit dengan total jumlah sebanyak 126 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan di Provinsi Gorontalo tahun 2017 sebanyak 65 kecamatan, berarti rasio pasar terhadap jumlah kecamatan adalah 1,9, atau tidak semua kecamatan memiliki sarana pasar tradisional. Berikut data jumlah Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Provinsi Gorontalo tahun 2017.

Tabel 2.13 Pasar Tradisional dan Pasar Modern 2017

Kabupaten/Kota	Pasar Tradisional	Pasar Modern	Jumlah
Kota Gorontalo	5 Pasar	4 Pasar	9 Pasar
Kab. Gorontalo	37 Pasar	1 Pasar	38 Pasar
Kab. Boalemo	19 Pasar	-	19 Pasar
Kab. Pohuwato	18 Pasar	-	18 Pasar
Kab. Bone Bolango	17 Pasar	-	17 Pasar
Kab. Gorontalo Utara	25 Pasar	-	25 Pasar
Provinsi Gorontalo	121 Pasar	5 Pasar	126 Pasar

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2017

Disamping itu, peran pelaku UKM selaku sektor riil di daerah tercermin melalui aktifitas perdagangan Gorontalo baik ekspor maupun antar pulau. Berikut data perkembangan ekspor Gorontalo tahun 2012 – 2017.

Tabel 2.14 Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo

NO	KOMODITI	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
		Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)
1	Kayu	194,680	107,732	61,028	-	-	363,440
2	Bungkil Kopra	-	14,882,000	-	-	8,300,000	23,182,000
3	Arang Tempurung	-	-	-	130,698	-	130,698
4	Jagung Kuning	29,300,010	-	6,400,000	37,485,735	-	73,185,745
5	Kelapa	-	-	-	-	25,624	25,624
6	Gula Tetes	54,033,840	8,500,200	33,935,668	-	19,999,956	116,469,664
7	Material Campuran	-	-	-	-	9,155	9,155
8	Sabut Kelapa	-	-	-	13,399	67,442	80,841
TOTAL		83,528,530	23,489,932	40,396,696	37,629,832	28,402,177	213,447,167

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2017

Adapun data perkembangan nilai eksport Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15 Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo

NO	KOMODITI	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
		Nilai (US\$)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)
1	Kayu	276,361.58	159,195	85,412	-	-	520,968.58
2	Bungkil Kopra	-	4,016,650	-	-	1,272,877.57	5,289,527.57
3	Arang Tempurung	-	-	-	59,572	-	59,572.00
4	Jagung Kuning	7,360,900	-	1,787,000	9,553,219	-	18,701,119.00
5	Kelapa	-	-	-	-	10,090.08	10,090.08
6	Gula Tetes	6,468,273	1,105,026	4,059,114	-	2,873,050	14,505,463.00
7	Material Campuran	-	-	-	-	210,528.66	210,528.66
8	Sabut Kelapa	-	-	-	6,458	16,883.76	23,341.76
TOTAL		14,105,534.58	5,280,871	5,931,526	9,619,249	4,383,430.07	39,320,610.65

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2017

Tabel diatas menunjukkan adanya kecenderungan penurunan volume ekspor Gorontalo selang tahun 2012 – 2017. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain penurunan permintaan negara importir, stok barang daerah, kebijakan ekspor nasional dan negara importir, dan membaiknya harga komoditi antar pulau sehingga pelaku usaha lebih memilih perdagangan antar pulau ketimbang ekspor.

Komoditi ekspor terbesar Gorontalo adalah Jagung Kuning sebesar 73,185,745 Kg dengan nilai US\$ 18,701,119. Kemudian diikuti oleh Gula Tetes sebesar 256.141 Kg dengan total nilai ekspor mencapai US\$ 14.505.463, Bungkil Kopra sebesar 23,182,000 Kg dengan nilai US\$ 5,289,527.57, Kayu 363,440 Kg dengan nilai US\$ 520,968.58, Material Campuran 9,155 Kg dengan nilai US\$ 210,528.66, Arang Tempurung 130,698 Kg dengan nilai US\$ 59,572, Sabut Kelapa 80,841 Kg dengan nilai US\$ 23,341.76 dan terakhir Kelapa 25,624 Kg dengan nilai US\$ 10,090.08. Negara tujuan ekspor Gorontalo antara lain India, Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Philipina, Taiwan, dan Vietnam.

Pada prinsipnya, perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil, dan penyumberluaran (*outsourcing*). Fungsi kelembagaan KUMKM masih belum optimal karena banyak permasalahan internal. Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah ekonomi kreatif yang sampai saat ini masih sangat terbatas pengembangannya.

Tabel 2.16. Jumlah Bank Pemerintah dan Swasta di Provinsi Gorontalo

NO	NAMA BANK	ALAMAT	STATUS	
1	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jl. H. Nani Wartabone (ex. Jl. A. Yani)	KC	D
2	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jl. H. Nani Wartabone No. 32 (ex. Jl. A. Yani No.32)	KC	D

NO	NAMA BANK	ALAMAT	STATUS	
3	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jl. H. Nani Wartabone No. 22 (ex. Jl. A. Yani No.22)	KC	D
4	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jl. Agus salim Kota Gorontalo	KCP	D
4	PT. Bank Sulut	Jl. M.T. Haryono No.18	KC	ND
5	PT. Bank Muamalat Indonesia	Jl. Raja Eyato No. 35A	KC	D
6	PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	Jl. Prof. H.B. Yasin No.55, Limba U2,Kota Selatan	KC	D
7	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jl. H. Nani Wartabone No. 58 (ex. Jl. A. Yani No.58)	KC	D
8	PT. Bank Mega, Tbk	Jl. H. Nani Wartabone No. 139 (ex. Jl. Ahmad Yani No. 139) Gorontalo 96114	KC	D
9	PT. Bank Syariah Mandiri	Jl. H. Nani Wartabone No. 127 (ex. Jl. Ahmad Yani No. 127)	KC	D
10	PT. Bank Sinarmas	Jl. KH. Agus Salim (Basuki Rahmat) No. 11, Kel. Limba, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo	KC	D
11	PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	Jl. H. Nani Wartabone (d/h Jl. Ahmad Yani) No.32 B & 32 C, Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo	KC	D
12	PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk	Jl. Kartini No. 2 Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan	KC	
13	PT. Bank Panin, Tbk	Jl. Jend. Ahmad Yani, Biawao, Kota Selatan, Gorontalo	KC	D
14	PT. BPR Mega Zanur	Jl. H.B. Yasin No. 40, Kota Gorontalo	KP	ND
15	PT. BPR Paro Dana	Jl. Raya Limboto No. 40 KM 7, Desa Luh, Kec. Telaga	KP	ND
16	PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama	Jl. Prof. Dr. H.B. Yasin No. 67 (ex. Jl. Kartini No.67)	KC	ND
17	PT. BPR Telaga Sinar Cahaya	Jl. MH Thamrin Kel. Limba UI Kec. Kota Selatan	KP	ND

Sumber : Bank Indonesia Gorontalo 2017

Keberadaan perbankan di daerah diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk penguatan modal usaha melalui skim kredit. Salah satu skim yang sangat diminati adalah Kredit Usaha Rakyat disingkat KUR. KUR diarahkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kelayakan usaha namun tidak bankable dikarenakan tidak adanya asset yang bisa dijadikan jaminan. Sejak diluncurkan pada tahun 2008 hingga 2016 penyaluran KUR di Gorontalo telah mencapai Rp. 279.102.820.500, yang disalurkan kepada 36.782 UMKM se Provinsi Gorontalo.

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2016

Selang tahun 2012 – 2017 anggaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17 Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
		(Rp)	%	
2012	7.375.000.000	6.891.529.214	93.44	99.66
2013	8.675.000.000	8.336.488.806	96.09	99.26
2014	10.400.000.000	9.749.373.658	93.74	98.90
2015	14.120.000.000	13.404.891.830	94.93	99.15
2016	13.333.408.300	12.446.016.541	92.65	95.79
2017	11.417.612.120	9.574.234.843	83.85	86.92

* Cat. Realisasi per 31 Oktober 2017

Secara lebih detail, anggaran pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.18 dibawah ini. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017.

Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Koperasi & UMKM	2,757,108	3,091,410	3,615,910	9,179,073	6,436,055	2,498,547	3,010,213	3,451,319	8,590,779	5,718,137	0.91	0.97	0.95	0.94	0.89	0.32	0.35
Perdagangan	2,666,048	3,870,510	4,689,290	3,464,339	4,880,442	2,487,326	3,640,498	4,429,062	3,360,202	4,683,702	0.93	0.94	0.94	0.97	0.96	0.12	0.13
Perindustrian	1,951,844	1,713,080	2,094,800	1,476,587	2,116,950	1,905,655	1,685,777	1,868,990	1,453,909	2,044,176	0.98	0.98	0.89	0.98	0.97	0.00	0.01
Total	7,375,000	8,675,000	10,400,000	14,119,999	13,433,447	6,891,528	8,336,488	9,749,371	13,404,890	12,446,015	0.93	0.96	0.94	0.95	0.93	0.18	0.20

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2016

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Relisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5
1	Jumlah Koperasi (unit)	1.011	1.030	1.060	1.080	1.105	1.030	1.101	1.131	1.179	1.221	1.02	1.07	1.07	1.09	1.10
2	Jumlah Koperasi Berkualitas (unit)	15	15	15	15	20	15	15	15	15	23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.15
3	Penyaluran KUR (Rp. Milyar)	100	100	100	100	100	144.97	131.82	178.43	87	347.23	1.45	1.32	1.78	0.87	3.47
4	Jumlah UMKM (unit)	61.887	62.020	65.705	67.413	68.829	62.054	63.434	70.590	96.124	86.349	1.00	1.02	1.07	1.43	1.25
5	Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg difasilitasi modal usaha (WUB KK Miskin, WUB UMKM Potensial & WUB Mahasiswa) (UMKM)	330	750	650	750	1200	488	1316	847	1239	0	1.48	1.75	1.30	1.65	0.00
6	Jumlah IKM (unit)	11.718	12.706	13.075	13.323	13.696	12.602	13.542	13.668	14.762	14.025	1.08	1.07	1.05	1.11	1.02
7	Jumlah Sentra IKM (unit)	272	280	289	297	312	280	289	289	297	297	1.03	1.03	1.00	1.00	0.95

1	Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun (Pasar Tradisional)	1	6	4	4	4	1	6	4	5	4	1.00	1.00	1.00	1.25	1.00
2	Jumlah perdagangan antar pulau (Ton)	754.062	789.492	810.617	844.663	879.294	760.414	810.617	66.126	620.902	46.629	1.01	1.03	0.08	0.74	0.05
3	Informasi harga dan stok barang strategis (hari)	365	356	356	356	356	365	356	356	356	356	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	Penanganan kasus pengaduan konsumen (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Jumlah Tera dan Tera Ulang alat UTTP (unit)	12.000	12.400	12.750	13.100	13.500	14.044	14.050	14.100	14.150	14.200	1.17	1.12	0.64	0.39	0.21
6	Pasar Tertib Ukur (Pasar)	1	2	2	6	6	2	2	2	6	5	2.00	1.00	1.00	1.00	0.83
7	Fasilitasi penerbitan SKA untuk komoditi ekspor daerah (%)	100	Sejak Tahun 2013 ditangani oleh BPM-PTSP				100	Sejak Tahun 2013 ditangani oleh BPM-PTSP				1.00	Sejak Tahun 2013 ditangani oleh BPM-PTSP			
8	Perkembangan ekspor (Ton)	68.046	68.046	102.070	293.714	200.056	72.173	30.706	72.608	144.291	41.800	1.06	0.45	0.71	0.49	0.21
9	Pengujian komoditi (kali)	200	200	200	200	200	295	243	228	639	382	1.48	1.22	1.14	3.20	1.17
10	Penerbitan sertifikat mutu (Sertifikat)	12	12	12	12	12	12	18	22	23	11	1.00	1.50	1.83	1.92	0.92

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2017

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Analisis Kekuatan (Strength)

Guna menghadapi tantangan dan peluang kedepan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memiliki kekuatan antara lain :

- Visi dan misi organisasi yang jelas dan fokus
- Struktur OTK yang jelas membidangi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Didukung oleh 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yakni UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), UPTD Balai Pengembangan Industri Terpadu dan UPTD PLUT KUKM
- Laboratorium UPTD BPSMB telah TER-AKREDITASI dan dapat menerbitkan SERTIFIKAT MUTU BARANG bertaraf nasional (KAN/Komite Akreditasi Nasional)
- UPTD Pengembangan Industri Terpadu terletak di Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Kawasan Industri Pengolahan Pangan dan Pakan Ternak
- UPTD PLUT KUKM Merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memiliki fungsi pelayanan Usaha secara terpadu bagi Pengembangan Koperasi dan UMKM
- SDM yang memadai dari sisi jumlah maupun latar belakang pendidikan
- Didukung oleh aturan perundang-undangan dan regulasi pemerintah di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Political will pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

2. Analisis Kelemahan (Weakness)

- SDM aparatur yang memiliki sertifikat keahlian khusus masih sangat terbatas
- Masih terbatasnya jumlah PPNS bidang perdagangan dan industri
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai (seperti komputer, laptop, printer, LCD, kamera, scan, kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat, peralatan laboratorium, infrastruktur teknologi informasi dan lain-lain)
- Belum adanya Balai Diklat KUKM yang khusus membidangi pengembangan SDM Koperasi, UKM, IKM dan pelaku usaha lainnya

- Masih terbatasnya fasilitas laboratorium UPTD BPSMB sebagai sarana pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor dan antar pulau
- Fasilitas operasional Indonesia Single Window (ISW) sebagai sarana informasi pasar dan promosi komoditi unggulan daerah belum tersedia
- Unit pelayanan Koperasi belum
- Belum adanya Perda yang mengatur tentang Retribusi Uji dan Sertifikasi Mutu Barang
- Belum adanya system manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program dan kegiatan yang terintegrasi dengan kabupaten/ kota
- Masih lemahnya koordinasi dan keterkaitan program antara unit kerja dalam Dinas Kumperindag
- Belum berfungsinya Jabatan Fungsional (Jafung) lingkup Diskoperidag
- Volume dan beban kerja sangat tinggi
- Jumlah penelitian dan kajian tentang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan masih sangat minim
- Belum semua pelayanan public di Dinas Kumperindag memiliki SOP
- Anggaran SKPD masih sangat terbatas dibandingkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dimiliki
- Jabatan bagian perencanaan Dinas Kumperindag yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan evaluasi program hanya setingkat eselon IV, sementara tingkat aktifitas kerja dan tanggung jawab sangat tinggi.

3. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Kedepan, Dinas Kumperindag dihadapkan pada sejumlah peluang antara lain:

- Makin meningkatnya jumlah koperasi, UMKM, Industri Kecil Menengah dan pelaku usaha termasuk asosiasi profesi yang menaunginya
- Makin tingginya tuntutan terhadap kuantitas dan kualitas mutu produk KUMKM, IKM dan pelaku usaha yang berstandar internasional
- Ketersediaan produk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan makin meningkat
- Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan semakin tinggi

- Makin tingginya tuntutan terhadap kualitas SDM pelaku koperasi, UKM, IKM dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk
- Terbukanya kesempatan berusaha yang luas di sector industri kreatif seperti fesyen, pariwisata, radio dan film, desain grafis, dekorasi, industri daur ulang, dan lain-lain.
- Permintaan pasar terhadap produk unggulan yang berkualitas dan tersedia secara memadai untuk ekspor maupun antar pulau akan semakin meningkat
- Dukungan perbankan dalam perkuatan modal usaha bagi KUMKM, IKM dan pelaku usaha akan semakin besar
- Makin meningkatnya daya dukung perguruan tinggi dan lembaga riset untuk pengembangan KUMKM, industri dan perdagangan
- Makin meningkatnya daya dukung anggaran Dinas Kumperindag yang dibarengi dengan makin tingginya tuntutan kualitas kinerja hasil dan akuntabilitas publik
- Makin menjamurnya praktek ijon berkedok koperasi dan lembaga kredit mikro

b. Analisis Ancaman (Threat)

Kedepan, Dinas Kumperindag akan menghadapi sejumlah tantangan dan ancaman antara lain :

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi masih sangat rendah
- Kapasitas kewirausahaan, *skill*, dan *market intelligent* sebagian besar pelaku usaha dan koperasi di daerah masih rendah
- Standar mutu produk dan kemasan yang dihasilkan oleh pelaku industri di daerah belum memenuhi standar baku mutu internasional
- Semakin ketatnya standarisasi produk ekspor akibat persaingan pasar global yang akan membatasi ekspor komoditi unggulan daerah
- Makin tingginya arus barang impor yang sejenis yang masuk ke Gorontalo
- Dampak krisis global di Eropa akan semakin menekan ekonomi Indonesia termasuk Gorontalo, seperti penurunan permintaan ekspor Jagung akibat

tidak beroperasinya sejumlah pabrik pengolahan Jagung di Eropa dan Amerika

- Kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga dasar barang kebutuhan pokok dan strategis di daerah
- Jumlah penduduk dan angkatan kerja makin meningkat sementara kapasitas lapangan kerja/usaha yang tersedia terbatas akan memicu peningkatan pengangguran dan kemiskinan di daerah

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo didasarkan pada beberapa hal utama yaitu lemahnya kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, rendahnya kapasitas manajemen kelembagaan dan produktivitas Industri Kecil Menengah, belum membaiknya distribusi barang dan jasa, lemahnya akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Gorontalo, serta belum optimalnya kinerja layanan dan akuntabilitas publik SKPD.

Beberapa permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUMKM.
3. Rendahnya produktivitas, manajemen kelembagaan, akses permodalan dan pemasaran produk KUMKM.
4. Belum berkembangnya iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM.
5. Rendahnya kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan.
6. Masih rendahnya produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional.
7. Belum berkembangnya sentra dan kluster industri di daerah, yang mengakibatkan jumlah dan investasi dibidang industri rendah.
8. Belum memadainya infrastruktur distribusi barang dan jasa di daerah.
9. Pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen belum berjalan optimal..
10. Penyebaran informasi, promosi dan pemasaran produk/komoditi unggulan Gorontalo masih terbatas dan belum didukung dengan system informasi yang memadai.

11. Masih rendahnya ekspor komoditi unggulan Gorontalo utamanya hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan industri pengolahan.
12. Belum optimalnya peran UPTD BPSMB dalam meningkatkan kualitas dan standar mutu komoditi ekspor Gorontalo.
13. Masih rendahnya Layanan Usaha bagi KUKM
14. Belum ada kawasan Industri terpadu di Provinsi Gorontalo
15. Belum optimalnya diseminasi hasil-hasil penelitian di Provinsi Gorontalo, khususnya di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.
16. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Dinas Kumperindag
17. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD
18. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
19. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan kegiatan SKPD.
20. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

1. Visi Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022

Visi Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG MAJU, UNGGUL DAN SEJAHTERA”** Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022 ini mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

- a. Gorontalo Maju dan Unggul, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sector pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

b. Gorontalo Sejahtera, Yaitu:

- Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran;
- Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

2. Misi Provinsi Gorontalo tahun 2017 - 2022

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

- a. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan
- b. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan
- d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar

tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

- e. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah

3. Agenda Pembangunan Daerah

Untuk menunjukkan prioritas dalam Mewujudkan Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera dirumuskan 5 (lima) Agenda utama pembangunan, yaitu:

- a. Agenda pembangunan Pemerintahan, politik, dan keamanan. yang perlu mendapatkan prioritas dari agenda ini adalah Mendorong penguatan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
- b. Agenda Pembangunan Ekonomi. Hal – hal penting yang perlu mendapatkan prioritas penanganan antara lain adalah :
 - (1) Proses transformasi struktur ekonomi daerah dari kondisi pembangunan ekonomi yang kurang efisien menjadi lebih efisien dengan peningkatan produktivitas di semua bidang; dari pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat di perkotaan bisa tersebar merata di perdesaan; dari struktur ekonomi yang mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam menjadi ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tinggi; dari ekonomi berbasis komoditi sektor primer bisa digeser kearah ekonomi jasa dan ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi maritim dan lain-lain;
 - (2) Penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis pendukung sektor pembangunan ekonomi yang perlu menjadi prioritas daerah mengingat rendahnya daya saing Gorontalo maupun nasional salah satunya ditentukan oleh masalah penyediaan infrastruktur yang kurang memadai;
 - (3) Dukungan iptek dan pengembangan inovasi memegang peranan penting bagi peningkatan daya saing daerah.
- c. Agenda Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; hal – hal penting yang perlu menjadi perhatian antara lain mencakup:

- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia;
 - (2) Penyediaan lapangan kerja baru dalam upaya mendayagunakan tenaga kerja produktif yang tersedia karena adanya bonus demografi;
 - (3) Penanggulangan kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi persentasenya dan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin
 - (4) Pemerataan pendapatan yang selama beberapa tahun terakhir memburuk karena kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah lebih cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan penduduk miskin.
- d. Agenda pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian antara lain adalah:
- (1) Pengelolaan sumber daya alam yang baik dan ramah lingkungan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan nilai tambahnya dapat lebih besar dinikmati oleh masyarakat.;
 - (2) Mengembangkan potensi pertanian yang selama ini telah menjadi prime mover perekonomian di Gorontalo;
 - (3) Mengembangkan potensi wilayah laut Gorontalo yang luasnya mencapai 50.500 Km² lebih luas dari wilayah daratannya;
 - (4) Isu nasional terkait dengan ketahanan pangan, energi (ketenagalistrikan) dan ketahanan air. Ketiga sektor strategis ini yaitu pangan, energy dan air di masa yang akan datang akan semakin penting mengingat kebutuhan yang terus meningkat, sementara ketersediaannya relatif tetap, bahkan menurun; dan
 - (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, konservasi hutan dan pengelolaan bencana.
- e. Agenda pengembangan kewilayahan berbasis desa yang mencakup antara lain:
- (1) pemerataan pembangunan antar Kabupaten/Kota; pembangunan wilayah yang dititikberatkan pada potensi yang ada;
 - (2) pembangunan perdesaan, meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik seperti akses pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

4. Telaahan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD yang Mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah Tahun 2017 – 2022 bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dengan begitu maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD, yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan SKPD, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor tersebut agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2017 – 2022.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2022, maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memiliki kedudukan yang penting dalam mewujudkan Misi Provinsi yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan

Dengan kedudukan tersebut maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memiliki posisi yang strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo, melalui pembangunan koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan di daerah sehingga akan mampu menciptakan *multiplier growth effect* (efek pertumbuhan secara luas), yang langsung berdampak pada peningkatan produktifitas, daya saing sektor riil dan ekspor, serta berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan analisis faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan agenda pembangunan daerah, yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, yakni Agenda Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat antara lain yang mencakup pemerataan pendapatan yang selama beberapa tahun terakhir memburuk karena kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah lebih cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan penduduk miskin.

Berikut ini tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.20. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera				
No	Misi & Program KD dan Wakil KD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I	Misi I : Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan.			
1.	Program : Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Belum semua kabupaten/kota menyusun Kompetensi Inti Daerah untuk pelayan komoditas Rendahnya produksi & produktifitas sektor pertanian dan perikanan Keterbatasan dukungan dana APBD dalam mendorong produksi dan pengembangan industri di daerah	- Rendahnya kapasitas manajemen kelembagaan dan produktivitas Industri Kecil Menengah Pengembangan komoditi unggulan belum didukung sepenuhnya oleh kebijakan sektoral kab/kota	Tersedianya Roadmap Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Gorontalo Koordinasi dengan pusat Dukungan dana APBN
II	Misi III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan			

1.	Program : Pengembangan Koperasi dan UKM	Daya saing koperasi dan pelaku usaha (UKM/IKM) masih rendah	Lemahnya kapasitas dan Usaha Koperasi dan UKM Rendahnya Kapasitas Manajemen Kelembagaab dan Produktivitas UKM/IKM	
		Akses koperasi dan UKM terhadap permodalan, termasuk KUR masih sangat rendah.	Aspek kelayakan usaha Legal aspek (perijinan) Lemahnya kualitas SDM Koperasi dan UKM Rendahnya produktifitas UKM/IKM Rendahnya akses informasi - Tidak adanya jaminan utk agunan kredit /pinjaman	
2.	Program : Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Belum membaiknya distribusi barang dan jasa serta lemahnya akses pasar luar negeri terhadap produk dan komoditi unggulan daerah	Perdagangan antar pulau di 4 wilayah perbatasan belum terpantau Harga komoditi di dalam daerah sudah memadai sehingga pelaku usaha tidak tertarik untuk mengekspor.	Potensi komoditi unggulan untuk di ekspor dan di antarpulaukan Adanya MEA sehingga mendorong pelaku usaha untuk maju.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga di Pusat meliputi Renstra 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Sedangkan analisis Renstra Kabupaten/Kota meliputi Renstra Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango Khusus untuk Kabupaten Boalemo penyusunan Renstra SKPD bersamaan dengan penyusunan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.

1. Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Dalam Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 disebutkan bahwa Visi Kementerian KUKM adalah ***Menjadi Menjadikan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Sehat dan Kuat.***

Dalam upaya mencapai misi tersebut di atas, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi sebagai berikut :

“Memberdayakan Koperasi dan UKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan”.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkan Tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka Sasaran yang hendak dicapai oleh Kementerian KUKM RI adalah :

- a. Meningkatnya Kontribusi KUKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan
- b. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM
- c. Meningkatnya Wira Usaha Baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
- d. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat
- e. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
- f. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM
- g. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian KUKM RI Tahun 2015 – 2019, maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo perlu menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan daerah dan bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional di sektor koperasi dan UMKM. Keterpaduan dan sinergi program pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan koperasi dan UMKM di Gorontalo, yang didukung dengan dana APBD dan APBN (dekonsentrasi tugas pembantuan).

2. Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Dalam Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 disebutkan bahwa **Visi KementerianPerdagangan** adalah : ***Perdagangan sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan***, dengan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
- b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang tumbuh dan berkualitas
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka Tujuan Pembangunan Perdagangan Tahun 2015 – 2019 adalah :

- a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa
- b. Peningkatan pengamanan perdagangan.
- c. Peningkatan Akses dan pangsa pasar internasional
- d. Pemantapan Promosi ekspor dan Nation Branding
- e. Peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa
- f. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri
- g. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN)
- h. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
- i. Peningkatan kelancaran arus distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
- j. Peningkatan perlindungan konsumen
- k. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha
- l. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi
- m. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan
- n. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis berbasis kajian

Berdasarkan tujuan pembangunan perdagangan tersebut diatas maka sasaran yang akan dicapai Kementerian Perdagangan RI periode 2015 – 2019 dapt dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.
Sasaran Kementerian Perdagangan 2015 – 2019

MISI	1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan		2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas		3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan	
TUJUAN	1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional	6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri	8. Optimalisasi/ Penguatan pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang	10. Peningkatan Perlindungan Konsumen	12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi
	2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan	4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding	7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN)	9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha	13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan
SASARAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa (1)	Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation Branding) (4)	Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan (6)	Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang (8)	Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Perbatasan (5,7,9,10)	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal (12)
	Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional (2)	Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor (3, 4)	Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan Logistik Nasional (6)	Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah (9)	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa (10)	Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan (12)
	Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor (3)	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor (5)	Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Menurunnya Impor Barang Konsumsi (7)	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (9)	Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha (11)	Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi (13)
	Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif) (2,3)	Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan LN di Perbatasan				Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian (14)
		Meningkatnya Pelayanan & Kemudahan Berusaha Bidang Daglu				

3. Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Visi Kementerian Perindustrian RI berdasarkan Renstra 2015 – 2019 adalah **Indonesia menjadi Negara industry yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasiskan sumber daya alam dan berkeadilan dengan Misi:**

- a. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
- c. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- d. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat ketahanan nasional;

Tujuan pembangunan perindustrian nasional adalah terbangunnya industri yang tangguh dan berdaya saing, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan di jelaskan melalui Sasaran Strategis (prespektif pemangku kepentingan) sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian Nasional.
- b. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
- c. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
- d. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatnya Pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
- f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
- g. Menguatnya struktur industri

Dalam rangka mensinergikan pelaksanaan program pembangunan perindustrian maka ditetapkan sasaran pertumbuhan industri sebagai arah pembangunan yang akan dituju selang 2015 – 2019.

Pertumbuhan industri tahun 2015 – 2019 di targetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB dengan sasaran sebagaimana ditunjukkan pada table 3.21. untuk pencapaian sasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan. Adapun sasaran pertumbuhan industri ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21 Sasaran Pertumbuhan Industri

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	6.0	6.9	7.5	8.1	8.6

Kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional (5)	20.8	21.0	21.1	21.3	21.6
--	------	------	------	------	------

4. Kajian Renstra Kabupaten/Kota

a. Renstra Dinas Perindagkop Kota Gorontalo

Isu strategis Kota Gorontalo adalah sebagai berikut ini :

- 1). Menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- 2). Pengembangan kawasan perdagangan, industri dan jasa
- 3). Kompetensi inti : Kerajinan Sulaman dan Kue Kerawang
- 4). Peningkatan dan pengembangan pasar tradisional, pasar percontohan dan pasar modern
- 5). Penertiban PKL dan Pasar Tertib Ukur
- 6). Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha KUMKM
- 7). Peningkatan pengawasan barang dan perlindungan konsumen
- 8). Pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

b. Renstra Dinas Perindag KUMKM & PM Kabupaten Gorontalo

Isu strategis Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut ini :

- 1). Menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai lumbung pangan Provinsi Gorontalo.
- 2). Memperluas peran Agro Potombulu sebagai pelaku usaha pertanian, penyedia pupuk, benih dan alsintan, serta pengumpul.
- 3). Kompetensi Inti : Jagung, Pisang dan Ikan Olahan
- 4). Pengembangan pasar tradisional meliputi Pasar Limboto, Pasar Telaga, Pasar Bongomeme, Pasar Ternak Bongomeme, Pasar Isimu, Pasar Pulubala, Pasar Boliyohuto
- 5). Penataan PKL di pusat Ibukota Kab. Gorontalo antara lain Taman Menara Keagungan dan Shopping Center Limboto
- 6). Pengembangan Desa Mongolato Kec. Telaga sebagai sentra kerajinan dan Desa Bongo Kec. Batudaa Pantai sebagai Desa Wisata Budaya.
- 7). Penertiban rentenir berkedok koperasi yang beroperasi di wilayah Kab. Gorontalo
- 8). Pengembangan usaha dan kelembagaan KUMKM
- 9). Peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UKM

c. Renstra Dinas Perindagkop Kabupaten Boalemo

Isu strategis Kabupaten Boalemo antara lain :

- 1). Kab. Boalemo merupakan daerah lumbung pangan Provinsi Gorontalo, dengan komoditi utama Padi, Jagung, Cabe, Ikan dan Sapi.
- 2). Komoditi unggulan Boalemo masih sebatas hasil pertanian dan belum melalui industri olahan.
- 3). Mendorong perkembangan dan pertumbuhan wirausaha berbasis kompetensi inti Jagung, Ikan dan Sapi sebagai komoditi unggulan daerah.
- 4). Rendahnya akses permodalan KUMKM, IKM dan pelaku usaha lainnya.
- 5). Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional yang diikuti dengan penataan PKL.
- 6). Pengembangan usaha dan kelembagaan KUMKM.
- 7). Pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan industri.
- 8). Pengembangan desa nelayan berbasis industri pengolahan.

d. Renstra Dinas Perindagkop Kabupaten Pohuwato

Isu-isu strategis :

- 1). Mendorong pertumbuhan sektor pertanian berbasis industri pengolahan di daerah.
- 2). Menciptakan kluster industri pengolahan Jagung dan hasil laut.
- 3). Kompetensi inti : Jagung, Ikan, dan Kopra
- 4). Menjadikan Kabupaten Pohuwato sebagai lumbung pangan Provinsi Gorontalo.
- 5). Pengembangan Kecamatan Marisa sebagai pusat perdagangan dan jasa, Kecamatan Paguat sebagai pusat perikanan yang didukung oleh industri pengolahan, Kecamatan Randangan dan sekitarnya sebagai pusat pertanian berbasis industri, dan Kecamatan Popayato sebagai kawasan perkebunan berbasis industri.
- 6). Mendorong pembangunan/pengembangan pelabuhan untuk kegiatan ekspor impor.
- 7). Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM serta peningkatan akses terhadap permodalan.

- 8). Peningkatan infrastruktur pasar tradisional, pasar semi modern dan pasar modern serta pergudangan dalam rangka kelancaran arus distribusi barang/jasa.
 - 9). Peningkatan pengawasan barang yang masuk dan keluar melalui pos perbatasan provinsi.
- e. Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Bone Bolango
- Isu-isu strategis :
- 1). Penataan kawasan pergudangan dalam rangka mendukung aktivitas pelabuhan Gorontalo.
 - 2). Penataan kawasan perdagangan dan industri.
 - 3). Pembangunan/pengembangan pasar tradisional.
 - 4). Kompetensi inti : Gula Aren, Kakao dan Ubi
 - 5). Pendayagunaan Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Bone Bolango sebagai inkubator IKM di daerah melalui pengelolaan yang professional.
 - 6). Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM sebagai penggerak sektor ekonomi di daerah, termasuk peningkatan akses terhadap permodalan.
- f. Renstra Dinas Kumperindag Kabupaten Gorontalo Utara
- Isu-isu strategis :
- 1). Pengembangan kawasan perikanan dan kelautan berbasis industri pengolahan.
 - 2). Penataan kawasan pergudangan dalam rangka menunjang aktivitas Pelabuhan Anggrek.
 - 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM termasuk peningkatan akses terhadap permodalan.
 - 4). Kompetensi inti : Ikan dan Rumput Laut
 - 5). Pengembangan industri pengolahan kayu dan hasil hutan.
 - 6). Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL.
 - 7). Mendorong tumbuhnya industri perkapalan.
 - 8). Pemberdayaan masyarakat di 5 kecamatan pesisir pantai berbasis industri pengolahan dan perdagangan.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030 (Perda Nomor 04 Tahun 2011), disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi, dan social budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Maju dan Mandiri.

Untuk itu maka kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo meliputi beberapa sudut kepentingan antara lain :

1. Kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Kepentingan sosial dan budaya;
3. kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
4. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dengan mengacu pada arahan RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 tersebut diatas, maka arah pelayanan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 adalah untuk mendukung :

1. Rencana pengembangan system perkotaan yang meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Gorontalo; dan
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW/Provinsi) meliputi Isimu, Kwandang, dan Tilamuta, serta Pusat Kegiatan Wilayah Potensial (PKWp) masing-masing PKWp Marisa dan PKWp Suwawa.
2. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yang memiliki Nilai Strategis, meliputi :
 - a. Kawasan Budidaya Nasional, meliputi (a) Kawasan Andalan Gorontalo dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan; (b) Kawasan Andalan Marisa dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan; dan (c) Kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

- b. Kawasan Budidaya Provinsi, khususnya Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - 1). Kawasan Industri Skala Besar di kawasan Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
 - 2). Kawasan Ekonomi Strategis meliputi Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.
 - 3). Kawasan Industri Skala Kecil dan Menengah, yang bersifat strategis dalam skala provinsi dan kabupaten/kota.
- 3. Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo (KSP), meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis, meliputi KSP Randangan dan sekitarnya, KSP Pawonsari dan sekitarnya, KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan sekitarnya;
 - b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi KSP Kota Gorontalo dan sekitarnya dan KSP Marisa dan sekitarnya;
 - c. Pengembangan kawasan terpadu industri, perdagangan dan simpul transportasi darat, udara dan kereta api KSP Isimu
 - d. Pengembangan kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas, dan pergudangan KSP Anggrek;
 - e. Kawasan potensi pengembangan ekonomi Gorontalo – Paguyaman – Kwandang (Gopandang) dengan sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri; dan
 - f. Pengembangan kawasan Minapolitan, meliputi Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato serta kawasan pengelolaan Teluk Tomini.

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan

produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah ;

- a. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM
- b. Rendahnya kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar
- c. Belum terbangunnya kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM (v) kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jatidiri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Tantangan dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan akses permodalan terhadap koperasi dan UMKM, meningkatkan kapasitas SDM, manajemen teknis dan adopsi teknologi bagi pelaku UMKM, dan mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggota koperasi yang menjadi kekuatan inti koperasi dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

2. Bidang Perindustrian

Isu strategis di bidang perindustrian adalah pemasaran hasil industri masih bersifat local, peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kuantitas dan kualitas produksi yang dihasilkan rendah, masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku import, Industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif, masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah di daerah dan masih rendahnya kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan.

3. Bidang Perdagangan

Isu strategis di bidang perdagangan adalah belum baiknya system distribusi barang dan jasa serta masih rendahnya akses pasar luar negeri. Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam

kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi), belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen, serta terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi. Demikian halnya dengan kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi. Disamping itu, permasalahan lainnya yang perlu memperoleh perhatian adalah masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Sedangkan rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

4. Bidang Pelayanan SKPD

Isu strategis di bidang pelayanan SKPD adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

- a. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM
- b. Peningkatan Peran IKM Dalam Perekonomian Daerah
- c. Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan

2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kumperindag Tahun 2012 – 2017 meliputi :

- a. Meningkatnya Koperasi Sehat,
- b. Meningkatnya koperasi yang menjalin kemitraan
- c. Meningkatnya jumlah UKM naik kelas
- d. Meningkatnya Pertumbuhan IKM
- e. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja IKM
- f. Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri
- g. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan.

Tabel 4.22. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG MAJU, UNGGUL DAN SEJAHTERA

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
Misi III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil										
1	Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Persentase Kerjasama Investasi di bidang Koperasi	- Meningkatkan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun n}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT}} \times 100\%$	10%	10%	10%	10%	10%
			- Meningkatkan Koperasi yang menjalin kemitraan	-Persentase Koperasi yang menjalin kemitraan di berbagai sektor usaha	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang menjalin kemitraan tahun n}}{\text{Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT}} \times 100\%$	10%	10%	10%	10%	10%
		Rata-rata produktifitas UKM	Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	$\frac{\Sigma \text{Jumlah UKM Naik Kelas Tahun n}}{\text{Tahun n}}$	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM
2	Peningkatan Peran IKM Dalam Perekonomian Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	Jumlah IKM Tahun n - Jumlah IKM Tahun (n-1)	50	50	50	50	50
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja IKM	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja IKM	Jumlah Tenaga Kerja IKM Tahun n - Jumlah Tenaga Kerja IKM Tahun n-1	100	100	100	100	100
3	Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB Perdagangan	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	$\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}(n + 1) - \text{Inf}(n)}{\text{Inf}(n)} \times 100\%$	4,34%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%
			Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar sesuai Ketentuan	$\frac{\Sigma \text{Hasil Temuan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Temuan yang Terjadi}} \times 100\%$	60%	70%	80%	90%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan SKPD

1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Strategi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perluasan usaha Koperasi dan UKM sebagai berikut :

Tabel 5.23. Strategi dan Kebijakan Bidang KUMKM

Strategi	Kebijakan
1. Mendorong koperasi aktif untuk melaksanakan RAT melalui penguatan kelembagaan, usaha dan permodalan serta memfasilitasi kerjasama koperasi dengan lembaga usaha lainnya	Penguatan Kelembagaan, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi melalui peningkatan SDM
2. Peningkatan jaringan kerjasama dan Penguatan Manajemen Usaha Pelaku UKM	1. Pengembangan Kerjasama UKM dan Informasi serta Pengembangan Pemasaran Hasil Produk UKM. 2. Pengembangan Wirausaha Mikro untuk Naik Kelas

2. Bidang Perindustrian

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.24. Strategi dan Kebijakan Bidang Perindustrian

Strategi	Kebijakan
Mendorong Peran IKM dalam Perekonomian Daerah melalui Jumlah usaha IKM yang di bentuk dan di fasilitasi menjadi industri yang mampu dan mandiri	Pengembangan industri kecil menengah melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha

3. Bidang Perdagangan

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta akses pasar luar negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 5.25. Strategi dan Kebijakan Bidang Perdagangan

Strategi	Kebijakan
Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan komoditi ekspor dan penciptaan iklim usaha antar pulau serta pengawasan perbatasan dan hubungan yang lebih berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen	1. Meningkatkan iklim usaha hubungan yang sehat antar pelaku usaha dan konsumen serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok 2. Menyelenggarakan perlindungan konsumen yang sinergis, harmonis dan terintegrasi terhadap komoditi ekspor unggulan yang efektif lintas daerah, lintas sektor dan lintas pelaku usaha

4. Bidang Pelayanan SKPD

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.26. Strategi dan Kebijakan Bidang Pelayanan SKPD

Strategi	Kebijakan
Mendorong implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan serta percepatan reformasi birokrasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan public	Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan publik dengan mengoptimalkan sumberdaya SKPD melalui penataan manajemen organisasi, sarana prasarana, kualitas perencanaan, pelaksanaan, monev dan pelaporan serta koordinasi yang efektif lintas pusat, lintas daerah, lintas sektor dan lintas pelaku

Untuk lebih lengkapnya dapat lihat dalam Tabel 5.24. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.27. Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu Pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022

Visi : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG MAJU, UNGGUL DAN SEJAHTERA**

Misi dan Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil					
1. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Persentase Kerjasama Investasi di bidang Koperasi	- Meningkatkan Koperasi Sehat	- Persentase Koperasi Sehat	Mendorong koperasi aktif untuk melaksanakan RAT melalui penguatan kelembagaan, usaha dan permodalan serta memfasilitasi kerjasama koperasi dengan lembaga usaha lainnya	Penguatan Kelembagaan, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi melalui peningkatan SDM
		- Meningkatkan Koperasi yang menjalin kemitraan	- Persentase Koperasi yang menjalin kemitraan di berbagai sektor usaha		
	Rata-rata produktifitas UKM	Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	Peningkatan jaringan kerjasama dan Penguatan Manajemen Usaha Pelaku UKM	1. Pengembangan Kerjasama UKM dan Informasi serta Pengembangan Pemasaran Hasil Produk UKM. 2. Pengembangan Wirausaha Mikro untuk Naik Kelas
2. Peningkatan Peran IKM Dalam Perekonomian Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	Mendorong Peran IKM dalam Perekonomian Daerah melalui Jumlah usaha IKM yang di bentuk dan di fasilitasi menjadi industri yang mampu dan mandiri	Pengembangan industri kecil menengah melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja IKM	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja IKM		
3. Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB Perdagangan	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan komoditi ekspor dan penciptaan iklim usaha antar pulau serta pengawasan perbatasan dan hubungan yang lebih berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen	1. Meningkatkan iklim usaha hubungan yang sehat antar pelaku usaha dan konsumen serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok 2. Menyelenggarakan perlindungan konsumen yang sinergis, harmonis dan terintegrasi terhadap komoditi ekspor unggulan yang efektif lintas daerah, lintas sektor, dan lintas pelaku usaha
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar sesuai Ketentuan		

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 serta untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selang 5 (lima) tahun, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan KUKM dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penguatan SDM dan kelembagaan Koperasi
 - 2) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi,
 - 3) Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan Bagi KUKM
 - 4) Peningkatan Kemitraan Koperasi
 - 5) Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha
 - 6) Pengembangan Layanan Usaha KUKM, dengan target sebesar 100 KUKM yang difasilitasi pendampingan usaha oleh PLUT KUKM di tahun 2022;
2. Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UKKM,
 - 2) Pembinaan UMKM Naik Kelas,
 - 3) Lomba Inovasi /UMKM Model dan Percontohan daerah,
 - 4) Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UKM/IKM,
 - 5) Promosi dan Pemasaran Produk UMKM
 - 6) Pengembangan Layanan Usaha KUKM, dengan target sebesar 100 KUKM yang difasilitasi pendampingan usaha oleh PLUT KUKM di tahun 2022;
3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag,
 - 2) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB
 - 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 4) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
4. Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD,
- 2) Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program & Kegiatan,
5. Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan :
 - 1) Peningkatan Perdagangan Antar Pulau
 - 2) Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
 - 3) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
 - 4) Penyelesaian Pengaduan dan sengketa Konsumen
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor Daerah
7. Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang, dengan kegiatan :
 - 1) Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
 - 2) Penerapan Standarisasi Mutu Barang
8. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, dengan kegiatan :
 - 1) Pengembangan Agro Industri & Industri Pangan Daerah
 - 2) Pengembangan Industri Kerajinan Daerah
 - 3) Pengembangan Industri Hulu dan Hilir
 - 4) Pembinaan Teknologi Industri Pangan
 - 5) Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka
 - 6) Pembinaan Teknologi Industri Logam Mesin Elektronik dan Alat Angkut
 - 6) Pengembangan Sentra Industri Agro terpadu
 - 7) Pengembangan Sistem Informasi IKM
 - 8) Pengembangan Industri Agro Terpadu

Secara lebih lengkap, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada pada Tabel 6.28. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan yang mengacu pada RPJMD 2017 - 2022 sebagaimana terlampir :

Tabel 6.28. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Provinsi Gorontalo
Yang Mengacu pada RPJMD 2017-2022

Tujuan	Sasaran	No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)		Bidang Penanggung-jawab
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.13	KOPERASI DAN UMKM															
1. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM	1. Meningkatnya Koperasi Sehat 2. Meningkatnya Koperasi yang Menjalinkan Kemitraan	1.13.01	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	- Indikator Kinerja Tujuan 1:													BIDANG KOPERASI	
				Persentase Kerjasama Investasi di Bidang Koperasi														
			- Indikator Sasaran 1:															
			Persentase Koperasi Sehat		10%		10%		10%		10%		10%		10%			
			Persentase Koperasi yang Menjalinkan Kemitraan di Berbagai Sektor Usaha		10%		10%		10%		10%		10%					
			Jumlah Koperasi Berkualitas		10 Koperasi		10 Koperasi											
			Jumlah UMKM Yang Naik Kelas		50 UMKM		50 UMKM											
			- Program (outcome) dan Kegiatan (output):															
			Jumlah Koperasi Aktif	658 Koperasi Aktif	668 Koperasi Aktif	1,750	678 Koperasi Aktif	1,850	693 Koperasi Aktif	2,650	708 Koperasi Aktif	2,900	728 Koperasi Aktif	3,050	728 Koperasi Aktif			
			Jumlah Koperasi Berprestasi	15 Koperasi Berkualitas dan 10 Kop. Berprestasi	10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi		10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi		10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi		10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi		10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi					
			Kegiatan :															
			Penguatan SM dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan	3627 Pengurus/ Pengelola	120 pengurus dan pengelola yang dilatih	500	120 pengurus dan pengelola yang dilatih	500	150 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih	500	150 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih	550	150 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih	600	690 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih		
				Jumlah Revitalisasi Koperasi						10 Koperasi	200	10 Koperasi	200	10 Koperasi	200	30 Koperasi		
			Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	3 Dokumen	3 dokumen	500	3 dokumen	500	7 dokumen	500	7 dokumen	500	7 dokumen	500	27 doukmen		
				Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih	1 satgas (provinsi)	1 satgas (provinsi)	150	2 satgas	200	1 tim satgas	250	1 tim satgas	300	1 tim satgas	300	1 Tim satgas		
				Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10 Koperasi	10 Koperasi	100	10 Koperasi	100	10 Koperasi	200	10 Koperasi	250	10 Koperasi	250	50 Koperasi		
				Jumlah pemeriksaan KSP/USP						10 Koperasi	200	10 Koperasi	250	10 Koperasi	250	30 Koperasi		
			Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas pembiayaan bagi KUKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan	97.364 KUKM	500 KUKM	350	750 KUKM	400	1.000 KUKM	450	1.250 KUKM	450	1.500 KUKM	500	5.000 KUKM		
				Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan	6 kali	6 kali	150	6 kali	150							12 kali		

Tujuan	Sasaran	No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)		Bidang Penanggung-jawab
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3. Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas			Peningkatan Kemitraan Koperasi	Jumlah kerjasama antar koperasi dan lembaga lainnya					24 Koperasi	100	24 Koperasi	150	24 Koperasi	200	72 Koperasi		BIDANG KOPERASI	
			Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Koperasi Pasar					5 kali	150	5 kali	150	5 kali	150	15 kali			
				Jumlah pengembangan jaringan usaha koperasi pasar					5 unit	100	5 unit	100	5 unit	100	5 unit			
		2.7	USAHA KECIL MENENGAH														BIDANG UKM	
		2.7.1	Program Pengembangan UKM															
				- Indikator Kinerja Tujuan 1:		50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	250 UKM				
				Rata-Rata Produktifitas UKM														
				- Indikator Sasaran 1:														
				Rata-Rata UKM Naik Kelas														
				- Program (outcome) dan Kegiatan (output):														
				Jumlah UKM yang dibina/naik kelas	20 UKM	50 UKM	5200	50 UKM	5750	50 UKM	6300	50 UKM	6850	50 UKM	7300	250 UKM		
		Kegiatan :																
		2.7.1.2	Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UMKM	Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktivitas dan pemasaran	304 UKM	200 UKM	500	200 UKM	500	100 UKM	300	150 UKM	400	200 UKM	500	850 UKM		
					6 UKM yang dimagangkan	100	6 UKM yang dimagangkan	100	6 UKM yang dimagangkan	100	6 UKM yang dimagangkan	100	6 UKM yang dimagangkan	100	30 UKM yang dimagangkan			
		2.7.1.3	Pembinaan UMKM Naik Kelas	Jumlah UMKM yang dibina	20 UKM	50 UKM	300	50 UKM	300	50 UKM	350	50 UKM	300	50 UKM	400	250 UKM		
		2.7.1.4	Lomba Inovasi/UMKM Model dan Percontohan Daerah	Jumlah UMKM Model/Percontohan		3 UKM Model	150	3 UKM Model	200									
		2.7.2.1	Peningkatan Kemitraan usaha bagi UKM/IKM	Jumlah UKM/IKM yang mengikuti temu mitra		200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	150	200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	150	200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	200	200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	250	200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	300	1000 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra		
		2.7.2.2	Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/dipasarkan di dalam & luar daerah		10 Produk UKM/IKM	500	15 Produk UKM/IKM	500	15 Produk UKM/IKM	600	20 Produk UKM/IKM	600	20 Produk UKM/IKM	600	80 Produk UKM/IKM		
			Pengembangan Layanan Usaha KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi pendampingan usaha oleh PLUT KUKM	50 KUKM	60 KUKM	200	70 KUKM	250	80 KUKM	400	90 KUKM	450	100 KUKM	500	400 KUKM		
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase Peningkatan Layanan Jasa Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	2,500	100%	2,750	100%	2,950	100%	3,200	100%	3,400	100%		SEKRETARIAT
		Kegiatan :																
			Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag	Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Dinas Kumperindag	100%	100%	750	100%	800	100%	850	100%	900	100%	950	100%		
			Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Kantor UPTD BPSMB	100%	100%	300	100%	350	100%	400	100%	450	100%	500	100%		

Tujuan	Sasaran	No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)		Bidang Penanggung-jawab
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Peresentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD	100%	100%	1200	100%	1,300	100%	1400	100%	1500	100%	1600	100%		SEKRETARIAT
			Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang di latih	35 ASN	20 ASN	250	20 ASN	300	20 ASN	300	20 ASN	350	20 ASN	350	135 ASN		
			Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi monitoring dan pelaporan	100%	100%	1,250	100%	1,300	100%	1,400	100%	1,500	100%	1,600	100%		
			Kegiatan :															
			Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	250	2 Dokumen	250	2 Dokumen	300	2 Dokumen	300	2 Dokumen	350	2 Dokumen		
			Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program & Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor/SKPD/Pusat	10 Dokumen Perencanaan	10 Dokumen Perencanaan	850	8 Dokumen Perencanaan	850	8 Dokumen Perencanaan	900	8 Dokumen Perencanaan	950	8 Dokumen Perencanaan	1,000	8 Dokumen Perencanaan		
		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD		12 Dokumen Monitoring & Evaluasi	12 Dokumen Monitoring & Evaluasi	150	7 Dokumen Monitoring	200	7 Dokumen Monitoring	200	7 Dokumen Monitoring	250	7 Dokumen Monitoring	250	7 Dokumen Monitoring			
			JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN UKM				5,500		5,900		7,000		7,600		8,050			
		2	URUSAN PILIHAN															
		2.7	PERDAGANGAN															
2 Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan	- Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri - Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	2.6.2	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	- Indikator Kinerja Tujuan:													BIDANG PERDAGANGAN	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB Perdagangan														
				- Indikator Sasaran :														
				Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat		4,34%		2,15%		2,15%		2,15%		2,15%		2,15%		
				Persentase Barang Beredar sesuai Ketentuan		60%		70%		80%		90%		100%		100%		
				Perdagangan antar pulau		2640 Kali		2880 Kali										
				Eksport komoditi unggulan daerah		10 kali eksport		10 kali eksport										
				- Program (outcome) dan Kegiatan (output):														
				Jumlah Perdagangan antar Pulau	2400 kali	2640 kali	5,600	2880 kali	6,350	3120 kali	15,250	3360 kali	17,300	3600 kali	18,500	3600 kali		
				Kegiatan :														
		2.6.2.1	Peningkatan Perdagangan Antar Pulau	- Jumlah Sosialisasi Penerapan Aturan Perdagangan Antar Pulau	- 4 kali sosialisasi	1,500	4 kali sosialisasi	2,000	4 kali sosialisasi	2,000	4 kali sosialisasi	2,300	4 kali sosialisasi	2,500	4 kali sosialisasi			
				- aplikasi pelaporan antar pulau secara online	- -	-	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi			
		2.6.2.2	Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Operasi Pasar	-	20 kali Operasi Pasar	3,000	24 kali Operasi Pasar	3,250	120 kali Operasi Pasar	12,000	130 kali Operasi Pasar	13,500	150 kali Operasi Pasar	14,500	150 kali Operasi Pasar		

Tujuan	Sasaran	No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)		Bidang Penanggung-jawab
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pengembangan Teknologi Industri Pangan	Jumlah IKM Pangan berbasis Teknologi	6.473 IKM Pangan	40 IKM Pangan yang Difasilitasi dengan Teknologi	500	40 IKM Pangan yang Difasilitasi dengan Teknologi	500								BIDANG INDUSTRI	
			Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka	Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Penguasaan Teknologi	7.386 IKM Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka	30 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Fasilitasi dengan Teknologi	200	30 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Fasilitasi dengan Teknologi	300	50 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	600	60 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	700	70 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	800	240 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina		
			Pembinaan Teknologi Logam Mesin dan Elektronik	Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan elektronik yang dibina Penguasaan Teknologi	480 IKM Logam dan Mesin	30 IKM Logam dan Mesin yang Difasilitasi dengan Teknologi	300	30 IKM Logam dan Mesin yang Difasilitasi dengan Teknologi	700	20 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	800	20 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	900	20 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	1,000	120 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina		
			Pengembangan Sentra Industri Agro Terpadu	Jumlah Produksi Pakan Ternak yang Dihasilkan oleh Sentra Industri Agro	42 Ton	67 Ton	700	72 Ton	700									
			Pengembangan Sistem Informasi IKM	Data Informasi IKM					1 Sistem Informasi IKM	150	1 Sistem Informasi IKM	150	1 Sistem Informasi IKM	150	1 Sistem Informasi IKM			
			Pengembangan Agro Industri Terpadu	Jumlah Industri Agro Terpadu					1 Industri Agro Terpadu	500	1 Industri Agro Terpadu	750	1 Industri Agro Terpadu	1,000	1 Industri Agro Terpadu			
		JUMLAH URUSAN INDUSTRI					3,550		4,100		2,550		3,000		3,450			
		JUMLAH URUSAN DINAS KOPERASI, UMMK, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							16,000		17,750		27,200		30,600			

*(Rp. 000.000)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan Visi – Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo maka disusunlah program dan kegiatan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, yang memuat Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 antara lain :

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif sebanyak 70 Koperasi
2. Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas sebanyak 50 Koperasi
3. Meningkatnya Jumlah Koperasi Berprestasi sebanyak 50 Koperasi
4. Jumlah UMKM yang di bina (naik Kelas), sebanyak 250 UKM
5. Jumlah Komoditi Ekspor Unggulan Daerah, sebanyak 12 komoditi
6. Jumlah Perdagangan Antar Pulau sebanyak 1200 kali
7. Jumlah Sertifikat Mutu Barang, sebanyak 15 sertifikasi
8. Jumlah IKM yang dibina sebanyak, 1000 IKM
9. Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran, sarana Prasarana SKPD dan SDM Aparatur sebanyak 100%
10. Meningkatnya Perencanaan dan Koordinasi lintas sektor/SKPD/Pusat
11. Meningkatnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD
12. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD.

Untuk lebih jelasnya tertuang pada Tabel 7.29. Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.29. Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RPJMD
		2017	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Jumlah Koperasi Aktif & Jumlah Koperasi Berprestasi	658 Koperasi aktif, 15 Kop.Berkualitas dan 10 Kop. Berprestasi	668 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	678 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	693 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	708 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	728 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	728 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi
2	Jumlah UKM yang dibina/ Naik Kelas	20 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	250 UKM
3	Persentase peningkatan Layanan Jasa Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peresentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Eksport	6 Komoditi	7 Komoditi	8 Komoditi	9 Komoditi	10 Komoditi	12 Komoditi	12 Komoditi
6	Jumlah Perdagangan Antar Pulau	2400 Kali	2640 Kali	2880 Kali	3120 Kali	3360 Kali	3600 Kali	3600 Kali
7	Jumlah Sertifikat Mutu Barang	20 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	15 sertifikat
8	Jumlah IKM yang di bina	14.339 IKM	14.539 IKM	14.739 IKM	14.939 IKM	15.139 IKM	15.339 IKM	15.339 IKM

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk yang berfungsi mengarahkan pelayanan publik dan pembangunan daerah selang 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Renstra SKPD.

Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2017 – 2022 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikasi pendanaan SKPD, yang mengacu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022. Disamping itu, Renstra ini juga menyajikan data-data capaian kinerja RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 yang menggambarkan kondisi awal seluruh indikator kinerja, sebagai baseline dan *starting point* untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan SKPD selang lima tahun ke depan.

Semoga Dokumen Renstra ini bisa menjadi pedoman dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta sarana sinkronisasi program baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, lintas sektor dan lintas pelaku, sekaligus menjadi alat ukur pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

Gorontalo, Januari 2019

Kepala Dinas



Drs. M. Nadjamudin

NIP. 196305101993031013



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

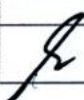
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk beberapa OPD yakni Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pariwisata ditemui permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diperlukan perubahan kegiatan pada OPD dimaksud untuk memaksimalkan pencapaian untuk sasaran OPD dan sasaran Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.**

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 1

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 65) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Mei 2019



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A blue ink signature of Darda Daraba.

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR ..23

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB